

**PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM
PEMBENTUKAN PERATURAN DESA DI DESA BENTENG
KECAMATAN PANGKALAN BARU KABUPATEN BANGKA
TENGAH**

SKRIPSI



Oleh:

Arie Septyari Rivanti

NIM. 4011511007

Program Peminatan : Hukum Tata Negara

**JURUSAN HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BALUNIJUK
2020**

**PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM
PEMBENTUKAN PERATURAN DESA DI DESA BENTENG
KECAMATAN PANGKALAN BARU KABUPATEN BANGKA
TENGAH**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (S-1) Pada Jurusan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Bangka Belitung**



Oleh:

Arie Septyari Rivanti

NIM. 4011511007

Program Peminatan : Hukum Tata Negara

**JURUSAN HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BALUNIJUK
2020**

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arie Septyari Rivanti

NIM : 4011511007

Jurusan : Hukum

Fakultas : Hukum

Judul skripsi :

**“Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa
Di Desa Benteng Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah”**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penelitian skripsi yang telah saya buat ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata dikemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib di Universitas Bangka Belitung. Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak dipaksakan.

Yang membuat pernyataan



Arie Septyari Rivanti

HALAMAN PERSETUJUAN

PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA DI DESA BENTENG KECAMATAN PANGKALAN BARU KABUPATEN BANGKA TENGAH

SKRIPSI

Oleh :

Arie Septyari Rivanti
NIM. 4011511007

Program Peminatan : Hukum Tata Negara

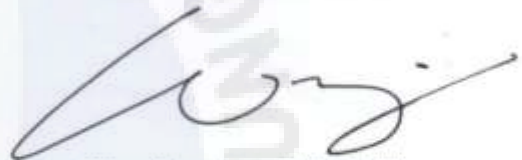
Telah Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama



Yokotani, S.H., M.H
NP. 606206003

Pembimbing Pendamping



Wirazilmustaan, S.H., M.H
NIP. 198809272014041001

Mengetahui,
Ketua Jurusan Hukum
Fakultas Hukum



(Dr. Derita Prapti Rahayu, S.H., M.H.)
NIP: 19801217201442001

HALAMAN PENGESAHAN

PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA DI DESA BENTENG KECAMATAN PANGKALAN BARU KABUPATEN BANGKA TENGAH

SKRIPSI

Oleh :

Arie Septyari Rivanti
NIM. 4011511007

Program Peminatan : Hukum Tata Negara

Telah dipertahankan di depan Majelis Penguji
Pada Tanggal 31 Januari 2020
Dan dinyatakan LULUS

Majelis Penguji

1. Ketua : Toni, S.H, M.H
NP. 608010028 (.....)
2. Sekretaris : Reko Dwi Salfutra, S.H, M.H
NIP. 1985041220141002 (.....)
3. Anggota I : Yokotani, S.H, M.H
NP. 606206003 (.....)
4. Anggota II : Wirazilmustaan, S.H, M.H
NIP. 198809272014041001 (.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bangka Belitung



(Dr. Dwi Haryadi, S.H.,M.H)
NIP. 198307172012121004

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Syukur Dalam Suksa dan Sabar Dalam Duka

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua saya atas nama Bapak Rizaldi dan Ibu Aryanti, orang-orang yang penuh kasih serta orang-orang istimewa yang telah memotivasi untuk segera menyelesaikan tugas akhir ku ini.
2. Keluarga besarku, terkhusus kakekku atas nama Asla Hatta dan Nenek atas nama Ani tercinta orang tua dari Ibu, serta kakek Alm.Anwar dan Nenek Almh.Rosmala tercinta orang tua dari ayah yang tanpa lelah memberikan nasehat kepadaku sampai aku bisa menjadi seperti sekarang.
3. Adik-Adik saya tersayang atas nama Dinar Sellyanti Wijaya, Nazharil Fernandi, dan Gibran Al-Adhim Ramadhan yang menjadi penyemangat saya untuk keberhasilan selama menempuh pendidikan gelar S1 Jurusan Hukum di Universitas Bangka Belitung.
4. Sahabat dan teman-teman seperjuanganku di Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung yang selalu memberikan semangat dan dorongan kepadaku.

ABSTRAK

Arie Septyari Rivanti

4011511007

PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA DI DESA BENTENG KECAMATAN PANGKALAN BARU KABUPATEN BANGKA TENGAH

Skripsi Fakultas Hukum 2020

Kata Kunci : Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, Peraturan Desa

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Badan Permusyawaratan Desa di desa Benteng Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah, dalam menjalankan perannya dalam pembentukan peraturan desa yang menjadi acuan terlaksanannya penyelenggaraan pemerintahan desa. Badan Permusyawaratan Desa berfungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan peraturan desa di Desa Benteng Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah (2) Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan upaya pembentukan peraturan desa di Desa Benteng Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris. Dari hasil penelitian penulis mengambil kesimpulan bahwa peran Badan Permusyawaratan Desa di desa Benteng kurang maksimal didalam menjalankan perannya sebagai wakil masyarakat desa dalam implementasi fungsinya sebagai legislator dalam proses pembentukan peraturan desa serta banyak faktor-faktor yang dihadapi dalam proses pembentukan peraturan desa seperti sumber daya manusia. Adapun faktor-faktor yang menjadi kendala Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan peraturan desa adalah faktor pendidikan, pekerjaan, kurangnya anggaran desa dalam setiap menjalankan proses legislasi.

ABSTRACT

Arie Septyari Rivanti

4011511007

THE ROLE OF THE VILLAGE CONSULTANTS AGENCY IN THE FORMATION OF VILLAGE REGULATIONS IN THE FORMAL VILLAGE OF PANGKALAN BARU, BANGKA TENGAH

Thesis of the Faculty of Law 2020

Keywords: Village Consultative Agency, Village Government, Village Regulation

This research aims to determine the role of the Village Consultative Agency in Benteng village, Pangkalan Baru Subdistrict, Central Bangka Regency, in carrying out its role in the formation of village regulations that serve as a reference for the implementation of village government. The Village Consultative Body functions to discuss and agree on the draft village regulations with the village head, accommodate and channel the aspirations of the village community, and supervise the performance of the village head. The problems examined in this study are (1) How is the role of the Village Consultative Agency in the formation of village regulations in Benteng Village, Pangkalan Baru District, Central Bangka Regency (2) What are the factors that influence the Village Consultative Agency in carrying out efforts to form village regulations in the Village Benteng Pangkalan Baru District, Central Bangka Regency. This research uses empirical legal research methods. From the results of the study the authors concluded that the role of the Village Consultative Agency in Benteng village was less than optimal in carrying out its role as a representative of the village community in implementing its function as a legislator in the process of forming village regulations as well as many factors encountered in the process of forming village regulations such as human resources. The factors that hampered the Village Consultative Agency in the formation of village regulations were education, employment, and the lack of a village budget in carrying out the legislative process.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Jurusan Hukum Universitas Bangka Belitung dengan skripsi yang berjudul : **Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa Di Desa Benteng Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah.**

Penulis menyadari segala keterbatasan atas kemampuan dan ilmu pengetahuan yang penulis miliki, maka dalam penyusunan skripsi ini juga tidak terlepas dari kekurangan-kekurangan. Baik itu dalam isi atau materi dan susunan kalimat, untuk itu penulis mohon dimaklumi atas kekurangan-kekurangan tersebut, serta segala saran dan kritik maupun masukan lainnya dari semua pihak akan penulis terima dengan senang hati demi perbaikan skripsi ini kearah yang lebih baik.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih serta penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah melakukan serta membimbing penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, yaitu kepada :

1. Bapak Dr. Ir. Muh. Yusuf, M.Si, selaku Rektor Universitas Bangka Belitung yang telah memberikan kesempatan yang sangat berharga kepada penulis

2. untuk menyelesaikan studi dalam bidang Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.
3. Bapak Dr. Dwi Haryadi, S.H.,M.H., selaku Dekan Jurusan Hukum Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.
4. Ibu Dr. Jeanne Darc Novianty Manik, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan Jurusan Hukum Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.
5. Ibu Dr. Derita Prapti Rahayu, S.H.,M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.
6. Bapak Toni, S.H.,M.H., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung dan juga selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan saran dan arahan tiada hentinya selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.
7. Ibu Yokotani, S.H.,M.H., selaku pembimbing utama yang telah membantu dan mengarahkan segenap kemampuan dan meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi serta saran-saran sehingga tersusunnya karya tulis ilmiah ini.
8. Bapak Wirazilmustaan, S.H., M.H. selaku pembimbing kedua yang telah membantu dan mengarahkan segenap kemampuan dan meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi serta saran-saran sehingga tersusunnya karya tulis ilmiah ini.

9. Seluruh unsur pegawai tata Usaha (TU) Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung (AUK, AAK, Jurusan, dll) dan Petugas UPT Perpustakaan yang telah membantu dengan memberikan pelayanan terbaik.
10. Sahabat-sahabat seperjuangan, terutama kelas A dan seluruh teman-teman Fakultas Hukum Angkatan 2015.
11. Keluarga Besar DPM KM FH UBB yang selama ini telah menyemangati, membantu, menjadi tempat diskusi paling baik serta mebersamai selama perkuliahan.
12. Almamaterku yang akan selalu menjadi kebanggan, Universitas Bangka Belitung. Tempat untuk mendapatkan ilmu, pelajaran serta pengalaman yang sangat berharga.

Akhirnya penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan dapat menambah khasanah pengetahuan kita dan semoga kedepannya, Universitas Bangka Belitung terkhusus untuk Jurusan Hukum ini dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan serta visi dan misi sehingga dapat membangun peradaban bagi masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Balunijuk, 21 Januari 2020



Arie Septyari Rivanti

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO	v
ABSTRAK	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian.....	7

E. Kerangka Teori	8
E. Metode Penelitian	21

**BAB II PEMERINTAHAN DESA, BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA, DAN PERATURAN DESA**

A. Pemerintahan Desa	30
1. Pengertian Pemerintahan Desa	30
2. Pengertian Desa	32
3. Bentuk Desa	33
4. Status Desa	34
B. Badan Permusyawaratan Desa	34
1. Pengertian Badan Permusyawaratan Desa	34
2. Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa	38
3. Fungsi dan Tugas Badan Permusyawaratan Desa	38
4. Kewenangan, Hak, dan Kewajiban Badan Permusyawaratan Desa	40
5. Syarat Menjadi Anggota Badan Permusyawaratan Desa	44
C. Peraturan Desa	45

**BAB III PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM
PEMBENTUKAN PERATURAN DESA DI DESA BENTENG
KECAMATAN PANGKALAN BARU KABUPATEN BANGKA
TENGAH**

A. Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa Di Desa Benteng Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah	56
B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Upaya Pembentukan Peraturan Desa Di Desa Benteng Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah	74

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	83
B. Saran	84

DAFTAR PUSTAKA	86
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN :

- 1. Daftar Riwayat Hidup**
- 2. Kartu Bimbingan Skripsi**
- 3. Surat Pernyataan Telah Melakukan Penelitian**
- 4. Lembaran Pengesahan Perbaikan (Revisi) Tugas Akhir/Skripsi**

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1. Orisinalitas Penelitian.....	26
Tabel 3.1. Batas Wilayah Desa Benteng	57
Tabel 3.2. Data Jumlah Mata Pencarian Masyarakat Desa Benteng.....	57
Tabel 3.3. Nama Anggota Perangkat Desa Benteng	59
Tabel 3.4. Nama Anggota Badan Permusyawaratan Desa Benteng.....	61
Tabel 3.5. Nama Anggota Rukun Tetangga Desa Benteng.....	62

